

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal pertama kali dijelaskan oleh Michael Spence (1973) dalam penelitiannya yang berjudul *JobMarket Signalling*. Spence menjelaskan tentang hubungan dua pihak yang saling berkaitan yaitu manajemen dan investor. Pihak manajemen selaku pihak internal yang memberikan sinyal dan pihak investor selaku pihak eksternal yang menerima sinyal tersebut

Teori sinyal adalah sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh para shareholder untuk mempertimbangkan dan menentukan dalam membeli saham pada perusahaan tertentu. Informasi tentang perubahan harga dan volume saham bermanfaat bagi para investor untuk membeli saham perusahaan tertentu (Suwardjono, 2005).

Salah satu jenis informasi yang berasal dari perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal perusahaan, khususnya pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi adalah informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menjelaskan tentang informasi yang relevan dan informasi yang vital untuk

diketahui oleh pengguna laporan baik pihak internal ataupun eksternal (Permatasari, 2018).

Kebijakan manajemen dalam usaha untuk menaikkan nilai perusahaan seperti penghindaran pajak dan manajemen laba bisa menjadi sinyal bagi para investor. Sinyal ini bisa menjadi *good news* ataupun *bad news* yang berdampak pada reaksi pasar. Penghindaran pajak dan manajemen laba sebagai salah satu bentuk kebijakan manajemen perusahaan bisa menjadi sinyal positif bagi para investor jika perusahaan ini juga telah menerapkan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan tercermin dari fungsi pengawasan komisaris independen dan komite audit.

Teori sinyal bermanfaat bagi perusahaan (*agent*), pemilik perusahaan (*principal*), dan pihak eksternal perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas dan independensi informasi laporan tahunan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan mempercayai keandalan informasi laporan tahunan khususnya laporan keuangan yang diinformasikan oleh pihak perusahaan (*agent*) maka sangat disarankan agar mendapatkan opini dari pihak akuntan publik yang independen dan profesional memberikan pendapat tentang laporan keuangan.

2.2 Tinjauan Pustaka

1. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat menunjukkan keadaan pasar saham terhadap perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan maka dapat menunjukkan ke

publik dalam menilai harga pasar saham perusahaan diatas nilai bukunya, sehingga ketika nilai perusahaan meningkat berarti publik menilai kinerja dan performa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, serta tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Vivi, 2017).

Secara umum menurut Pertiwi (2010) mengatakan bahwa banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan, diantaranya adalah

- a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earnings ratio.
- b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas.
- c. Pendekatan deviden antara lain pertumbuhan deviden
- d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva.
- e. Pendekatan harga saham.

Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar bisa menjadi ukuran nilai perusahaan.

Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan

tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy,2011).

Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan nilai beban pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada peningkatan jumlah laba setelah dipotong pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang dari laba perusahaan.

Manfaat perencanaan pajak menurut Mangoting (1999) adalah sebagai berikut:

- a. Penghematan kas keluar karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pemabayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Metode yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak menurut Lumbantoruan (1996), diantaranya yaitu

- a. Pergeseran Pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Sehingga orang atau badan yang dikenakan pajak bisa menghindari beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar undang-undang

perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

e. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Menurut Adityamurti (2017) *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara legal di mata hukum bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Pohan,2013).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah usaha penghindaran pajak yang berdampak pada kewajiban pajak dengan cara yang tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan kekurangan atau kelemahan dari undang-undang pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak terutang.

Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation (OECD) (Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization (1991) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Skema penghindaran pajak menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org dapat dibagi menjadi dua yaitu

- 1) Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan
- 2) Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

3. Manajemen Laba

a. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah kebijakan memodifikasi laporan keuangan khususnya untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan (Desri dan Muslih, 2019). Motivasi tertentu dapat mendorong manajer untuk melaporkan kegiatan atau laporan keuangan sesuai dengan kepentingan

perusahaan diinginkan atau dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Kebijakan perekayasaan laba ini justru akan berdampak negatif dimana akan berpengaruh terhadap kualitas laba yang menurun dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data laba atau secara keseluruhan laporan keuangan. Menurut Hery (2015) kebijakan merekayasa laba tidak selamanya hanya mengacu pada upaya memanipulasi data namun juga cenderung dengan pemilihan metode akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi yang ada.

b. Bentuk dan Pola Manajemen Laba

Bentuk dan pola manajemen laba menurut Scott (2017) ada 4 jenis yaitu:

- 1) *Taking a bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.
- 2) *Income minimization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya.
- 3) *Income maximization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya.

- 4) *Income Smoothing* adalah salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode.

c. Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba menurut Dedhy, dkk (2011) yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebijakan manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi yaitu estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
- 2) Penggantian metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi adalah mengganti metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
- 3) Salah satu rekayasa periode biaya atau pendapatan adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

d. Model Pendeteksian Manajemen Laba

1) Manajemen Laba Akrual

Manajemen laba akrual adalah salah satu teknik pengelolaan laba yang biasa digunakan. Manajemen laba akrual ditunjukkan dengan adanya *discretionary accrual* (diskresioner akrual). Penggunaan diskresioner akrual digunakan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan

keuangan yang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (Ningsih, 2015). Berikut ini dua kategori akrual yang umum digunakan dalam penelitian:

1) Akrual Non Diskresioner

Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual non diskresioner adalah komponen akrual yang berasal secara alamiah dari pencatatan dasar akrual dengan mengikuti standar akuntansi umum. Akrual ini tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.

2) Akrual Diskresioner

Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual diskresioner adalah komponen akrual hasil kebijakan manajerial dimana manajemen dapat memilih metode dan standar akuntansi yang digunakan.

Secara teori manajemen laba akrual yang bisa dijadikan indikator praktik dan kebijakan manajemen laba dalam sebuah perusahaan adalah akrual diskresioner. Dalam akrual diskresioner manajemen perusahaan memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam memilih dan menerapkan standar akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik secara umum dan masih dapat diperdebatkan.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

a. Definisi *Good Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) adalah serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (IICG,2006).

Corporate governance adalah mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan.

Corporate governance juga dapat diartikan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat sekitar (Tunggal, 2012).

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan teori dari para ahli tentang *corporate governance* diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* memiliki pengertian sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimana *corporate governance* memiliki tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* tersebut adalah *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure and Transparency* (Transparan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas).

1) *Fairness* (Kewajaran)

Menurut Daniri (2005), secara sederhana kesetaraan kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

2) *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi adalah penyampaian informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *shareholders*. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya (Sutedi, 2011).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) prinsip transparansi adalah perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah pengelolaan perusahaan didasarkan pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggungjawab pada

pengoperasian setiap harinya dan pemegang saham yang diwakili oleh dewan direksi (Sutedi,2011). Menurut Imam dan Amin (2002) akuntabilitas adalah perwujudan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris,dewan direksi, para investor, dan auditor.

Sehingga perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Sehingga perusahaan wajib dikelola secara efektif, efisien dan berdasarkan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas adalah syarat utama untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4) *Responsibility* (Tanggungjawab)

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep.117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance*. Prinsip Tanggungjawab adalah keselarasan praktik pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak – pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Manfaat penerapan *good corporate governance* menurut Tunggal (2002) adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dalam komunikasi
- 2) Minimalisasi potensial benturan
- 3) Fokus pada strategi-strategi utama
- 4) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- 5) Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefits*).
- 6) Promosi citra korporat (*corporate image*)
- 7) Peningkatan kepuasan pelanggan.
- 8) Perolehan kepercayaan investor.
- 9) Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

d. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung. Adapun menurut Agus Widjaja Tunggal (2013) unsur-unsur *good corporate governance* adalah

1) Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki posisi utama dalam perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik harus dapat melindungi hak investor dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan.

2) Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu komisaris

dan direksi mempunyai tanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja perusahaan apakah telah berjalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Komite Audit

Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

4) Sekretaris Perusahaan

Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Pertanggungjawaban sekretaris perusahaan kepada direksi.

5) Manajer

Tanggung jawab manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Sehingga seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan.

6) Auditor Eksternal

Tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan.

7) Auditor Internal

Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi didalam perusahaan.

e. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris yang ada. (Surya dan Yustiavandana 2006).

Beberapa kriteria tentang komisaris independent menurut peraturan BEI (Marichel, 2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- 5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

f. Komite Audit

Komite Audit berperan untuk menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris auditor internal (Sondokan, dkk 2019). Komite Audit bekerja secara professional independen dibentuk oleh dewan komisaris dimana tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Sistem pengawasan terhadap kinerja auditor internal oleh komite audit, diharapkan mampu meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang dapat mendatangkan kerugian keuangan bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat (Anjasari dan Andriati, 2016).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *tax avoidance*, manajemen laba, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel X	Hasil
1	Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Tax Avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan. (Chindy Annisa Violeta dan Vanica Serly, 2020)	X1 = Manajemen Laba X2 = Tax Avoidance	1. Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 2. <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan
2	Pengaruh Manajemen Laba dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Kualitas Laba dan Efeknya terhadap Nilai Perusahaan. (Eman Sulaeman, 2019)	X1 = Manajemen Laba X2 = Komposisi Komisaris Independen Variabel <i>Intervening</i> = Kualitas Laba	1. Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap kualitas biaya 2. Komposisi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas biaya 3. Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan 4. Komposisi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan 5. Kualitas laba memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 6. Kualitas laba memiliki peran mediasi dalam hubungan pengaruh manajemen laba dan komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan
3	Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. (Made Caesar Juliartha Nugraha, Putu Ery Setiawan, 2019)	X1= Penghindaran Pajak X2 = Transparansi Informasi	1. Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 2. Transparansi informasi dari perusahaan berpengaruh positif antara penghindaran pajak pada Nilai Perusahaan

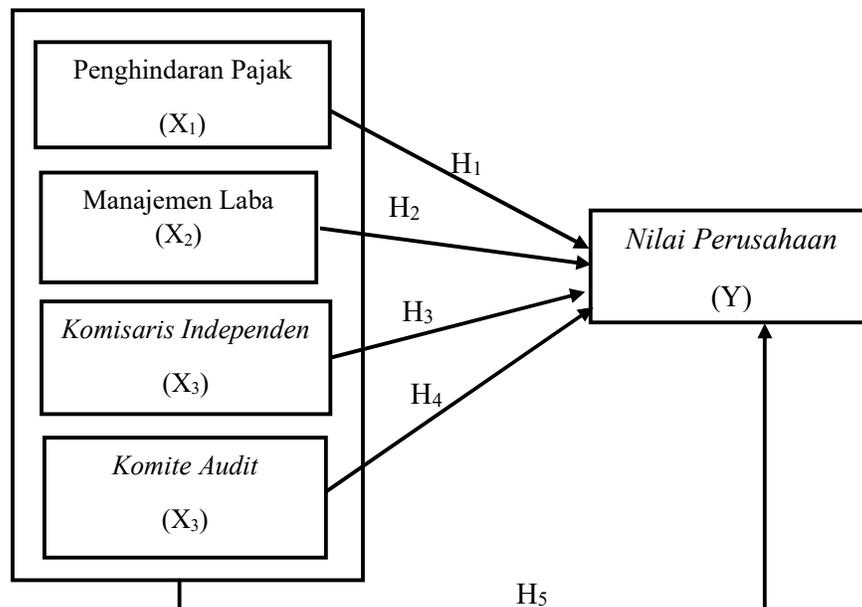
No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel X	Hasil
4	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. (Fitri Amaliyah dan Eliada Herwiyanti. 2019)	X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Dewan Komisaris Independen X3 = Komite Audit	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 2. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
5	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2017. (N.V.Sondokan, R.Koleangan, M.M.Karuntu. 2019)	X1 = Dewan Komisaris Independen X2 = Dewan Direksi X3 = Komite Audit	1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 2. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
6	Pengaruh Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2017. (Stevi Jimry Poluan, Arya Aditya Wicaksono, 2019)	X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Kepemilikan Institusional X3 = Komisaris Independen X4 = Komite Audit	1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 3. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 4. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel X	Hasil
7	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial terhadap nilai perusahaan Sektor Pertambangan. (Aryanto dan Christina Tri Setyorini, 2019)	X1 = Dewan Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = Tanggung Jawab Sosial	1. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 2. Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, komisaris independen, dan komite audit, dan manajemen laba. Sedangkan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara legal di mata hukum dengan memanfaatkan kelemahan pada undang-undang perpajakan (Pohan,2013). Menurut teori sinyal kebijakan *tax avoidance* akan berdampak pada reaksi pasar yaitu memberikan sinyal positif kepada pihak investor karena berdampak pada meningkatnya laba perusahaan sehingga nilai perusahaan juga naik. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nugraha dan Setiawan (2019), Sulaeman (2019), Novianto dan Dwimulyani (2019) menyebutkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif bagi nilai perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2. Pengaruh Manajemen laba terhadap Nilai Perusahaan

Manajemen laba adalah kebijakan memodifikasi laporan keuangan khususnya untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan (Desri dan Muslih, 2019). Teori sinyal menjelaskan bagaimana informasi perusahaan berupa laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas dapat berpengaruh terhadap reaksi para investor di pasar saham. Kebijakan manajemen

laba yang bertujuan membuat laba perusahaan bernilai positif akan mengirimkan sinyal positif kepada para investor. Sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Violeta dan Serly (2020), Riswandi dan Yuniarti (2020) serta penelitian Putri (2019) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Tanggung jawab komite audit adalah untuk menjamin strategi perusahaan mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Aryanto dan Setyorini, 2019).

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang mengaplikasikan *good corporate governance* memberikan sinyal positif kepada pihak investor. Karena para investor memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan meningkatkan pengawasan dalam menciptakan lingkungan usaha yang berdasarkan *good corporate governance*.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sondokan, dkk (2019), Agatha dan Nurlaela (2020) serta penelitian Widyarningsih (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan utama yang menjadi dasar harapan para pemangku kepentingan dalam membatasi perilaku manajer perusahaan (Aryanto & Setyorini, 2019).

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang mengaplikasikan *good corporate governance* memberikan sinyal positif kepada pihak investor. Karena para investor memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk mengawasi dan menjamin agar perusahaan menjalankan prinsip-prinsip akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel dan kredibel. Sehingga semakin banyak proporsi komite audit akan berdampak pada kinerja internal perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aryanto dan Setyorini (2019), Sondokan, dkk (2019) serta Amaliyah dan Herwiyanti (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

5. Pengaruh Penghindaran Pajak, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Teori sinyal menjelaskan bagaimana sebuah informasi perusahaan sangat berpengaruh dalam memberikan sebuah sinyal positif ataupun negatif bagi para investor. Informasi tersebut adalah laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kebijakan operasional perusahaan.

Variabel penghindaran pajak dan manajemen laba yang merupakan kebijakan yang diambil manajerial perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan serta berdampak pada nilai perusahaan. Variabel komisaris independen dan komite audit yang merupakan unsur *good corporate governance* juga berdampak pada sinyal positif bagi para pemilik saham karena meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dikelola dengan baik.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Violeta dan Serly (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Riswandi dan Yuniarti (2020) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sondokan, dkk (2019) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Amaliyah dan Herwiyanti (2019) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₄ : Pengaruh Penghindaran Pajak, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif dan simultan terhadap Nilai Perusahaan .

